



Dari Identitas Politik ke Politisasi Identitas: Kajian Konseptual atas Dinamika Polarisasi di Media Sosial

Febri Saefulloh^{1*}, Agung Tesa Gumilar², Titi Alawiyah³, kartika Delsya⁴, Ria Erica Salty⁵

¹⁻⁶Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: febrisaefulloh@untirta.ac.id^{1*}, agung.tesa@untirta.ac.id², titi.alawiyah@untirta.ac.id³,

kartika.delsya@untirta.ac.id⁴, ria.ericasalty@untirta.ac.id⁵

*Korespondensi penulis: febrisaefulloh@untirta.ac.id¹

Abstract. *Identity politics has become one of the most debated concepts in contemporary democratic discourse, yet its conceptual boundaries remain poorly defined in both academic and public conversations. This paper argues that three commonly conflated terms political identity, identity politics, and the politicization of identity carry fundamentally distinct meanings with divergent normative and practical consequences. Through a conceptual literature review, this study synthesizes theoretical frameworks and empirical findings to demonstrate that while political identity refers to an individual's self-positioning within a political community, and identity politics denotes collective action by marginalized groups seeking recognition, the politicization of identity is an elite-driven strategy of exploiting social group markers for political gain. This distinction matters because the conflation of these terms obscures how digital platforms through filter bubble and echo chamber mechanisms amplify identity-based polarization in Indonesia and beyond. The study finds that social media algorithms do not merely reflect pre-existing social divisions but actively intensify affective polarization by constructing homogeneous information environments that deepen inter-group animosity. The paper concludes with implications for digital citizenship and democratic resilience in Indonesia.*

Keywords: *Affective Polarization; Digital Citizenship; Echo Chamber; Filter Bubble; Politicization Of Identity.*

Abstrak. Politik identitas telah menjadi salah satu konsep yang paling diperdebatkan dalam diskursus demokrasi kontemporer, namun batas konseptualnya kerap tidak didefinisikan secara memadai baik dalam percakapan akademik maupun publik. Kajian ini berargumen bahwa tiga istilah yang acap kali dipertukarkan (identitas politik, politik identitas, dan politisasi identitas) memiliki perbedaan makna yang fundamental dengan konsekuensi normatif dan praktis yang berbeda. Melalui kajian literatur konseptual, studi ini mensintesis kerangka teoretis dan temuan empiris untuk menunjukkan bahwa identitas politik merujuk pada posisi individu dalam komunitas politik; politik identitas merupakan aksi kolektif kelompok marginal untuk meraih pengakuan; sementara politisasi identitas adalah strategi elite yang mengeksploitasi penanda kelompok sosial demi kepentingan kekuasaan. Perbedaan ini menjadi penting karena percampuradukan ketiga istilah tersebut mengaburkan cara platform digital melalui mekanisme filter bubble dan echo chamber memperkuat polarisasi berbasis identitas. Studi ini menemukan bahwa algoritma media sosial tidak sekadar mencerminkan perpecahan sosial yang sudah ada, melainkan secara aktif mengintensifikasi polarisasi afektif dengan membentuk lingkungan informasi yang homogen. Kajian ini diakhiri dengan implikasi bagi kewarganegaraan digital dan resiliensi demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Echo Chamber; Filter Bubble; Kewarganegaraan Digital; Polarisasi Afektif; Politisasi Identitas.

1. LATAR BELAKANG

Dalam satu dekade terakhir, istilah politik identitas menjadi salah satu frasa yang paling sering diucapkan sekaligus paling sering disalahpahami dalam percakapan politik Indonesia. Frasa ini meluncur bebas dari podium kampanye, linimasa media sosial, hingga artikel opini, namun dengan makna yang hampir selalu tidak konsisten. Pada satu titik, ia digunakan untuk menyebut mobilisasi berbasis agama dan etnis yang meradikalisasi pemilih; di titik lain, ia dipakai untuk mendelegitimasi tuntutan kelompok minoritas yang mencari pengakuan; di titik

lain lagi, ia seolah identik dengan identitas politik, yakni preferensi ideologis seseorang dalam lanskap demokrasi elektoral. Kerancuan terminologis ini bukan sekadar persoalan semantik. Ketika makna dikaburkan, maka penilaian moral dan kebijakan yang mengikutinya pun ikut tersesat.

Kerancuan ini semakin diperparah oleh ekosistem digital. Media sosial telah mengubah cara identitas dikonstruksi, disebarkan, dan dipertentangkan. Generasi Z, sebagai kelompok yang tumbuh dalam kejenuhan konten digital, mengonsumsi informasi politik sebagian besar melalui platform yang algoritmanya tidak dirancang untuk mempromosikan keberagaman perspektif, melainkan untuk memaksimalkan keterlibatan (*engagement*). Dalam lingkungan semacam ini, *filter bubble* dan *echo chamber* bukan sekadar konsep teoretis, melainkan kondisi ekologis yang membentuk orientasi politik sehari-hari (Pariser, 2011; Bail et al., 2018). Judijanto et al. (2024) mengonfirmasi bahwa keterikatan pada identitas politik tertentu yang diperkuat melalui media digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik, namun partisipasi tersebut kerap disertai bias konfirmasi dan peningkatan sentimen afektif negatif terhadap kelompok lawan.

Di Indonesia, fenomena ini memuncak dalam siklus elektoral pasca-2014, ketika politisasi identitas berbasis agama dan etnis menjadi instrumen utama mobilisasi massa. Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 menjadi laboratorium nyata bagaimana identitas, yang semula merupakan ekspresi kolektif kelompok, dimanipulasi menjadi bahan bakar polarisasi oleh aktor-aktor elite (Herdiansah, 2017; Mietzner & Muhtadi, 2018; Lestari, D., 2019). Mansyur (2023) dalam kajian pustakanya mencatat bahwa polarisasi yang terjadi pada periode 2014-2019 berakar pada penggunaan sentimen keagamaan dan etnis yang direproduksi secara sistematis oleh aktor politik untuk membelah pemilih. Polarisasi yang dihasilkan bukan semata perbedaan pandangan kebijakan, melainkan apa yang oleh Iyengar et al. (2019) disebut sebagai polarisasi afektif di mana terjadinya rasa permusuhan dan ketidakpercayaan antarkelompok yang melampaui batas-batas rasional.

Kajian ini hadir untuk merespons dua kebutuhan sekaligus. Pertama, kebutuhan konseptual: membedah dan memetakan perbedaan antara identitas politik, politik identitas, dan politisasi identitas secara jernih, karena perbedaan tersebut memiliki implikasi besar terhadap cara kita menilai fenomena yang sedang berlangsung. Kedua, kebutuhan empiris-normatif: menghubungkan peta konseptual tersebut dengan mekanisme digital (*filter bubble*, *echo chamber*, dan polarisasi afektif) guna memahami bagaimana politisasi identitas bekerja dalam ekosistem media sosial dan apa dampaknya terhadap kewarganegaraan digital di Indonesia.

Dengan demikian, tujuan kajian ini adalah: (1) mengklarifikasi perbedaan konseptual antara identitas politik, politik identitas, dan politisasi identitas; (2) mensintesis literatur tentang mekanisme digital yang memperkuat politisasi identitas; serta (3) menganalisis implikasinya terhadap polarisasi dan kewarganegaraan digital di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemahaman yang memadai tentang fenomena yang dikaji dalam tulisan ini mensyaratkan kejelasan konseptual atas tiga istilah yang kerap dipertukarkan namun sesungguhnya merujuk pada realitas yang berbeda.

Pertama, identitas politik (*political identity*) merujuk pada cara individu atau kelompok memosisikan diri dalam kaitannya dengan sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Bozonelos et al. (2022) mendefinisikannya sebagai keseluruhan elemen yang membentuk konsep diri seseorang dalam ranah politik, mencakup etnisitas, agama, gender, kelas, ideologi, kebangsaan, dan usia. Identitas politik, dalam pengertian ini, adalah kondisi natural dari setiap warga negara: setiap orang memilikinya, dan ia terbentuk melalui proses sosialisasi, pengalaman, dan refleksi. Haboddin (2012) dalam konteks Indonesia menegaskan bahwa identitas politik lebih dimaknai sebagai upaya seseorang untuk menentukan posisi kepentingannya dalam ikatan komunitas politik tertentu, bukan sebuah strategi, melainkan sebuah pendirian. Mashad (2021) mempertegas bahwa identitas dalam konstruksi politik bersifat kumulatif: seorang individu sekaligus dapat menyandang identitas etnis, agama, dan ideologi yang semuanya berperan dalam membentuk orientasi politiknya.

Kedua, politik identitas (*identity politics*) merujuk pada aktivitas politik yang diorganisasi di sekitar identitas kelompok tertentu (ras, etnis, agama, gender, atau kelas) dengan tujuan memperjuangkan kepentingan atau menuntut keadilan atas nama kelompok tersebut. Heyes (2020) mendefinisikannya sebagai aktivitas politik yang berangkat dari pengalaman ketidakadilan yang dialami kelompok sosial tertentu, dengan identitas bersama sebagai basis mobilisasi dan tuntutan. Mubarak (2023) menambahkan bahwa politik identitas dalam pengertian ini pada dasarnya adalah fenomena yang lahir dari ketidakadilan: kelompok yang merasa terpinggirkan oleh kekuasaan negara menggunakan identitas bersama mereka sebagai modal perlawanan. Lestari, Y. S. (2018) dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa tegangan antara nasionalisme dan identitas keagamaan merupakan salah satu akar dari politisasi yang terus berulang, karena kelompok-kelompok keagamaan kerap berupaya mengamankan posisi mereka dalam struktur negara melalui aktivisme berbasis identitas. Contoh komparatif dari Israel-Palestina yang diuraikan Heaphy (2021) memperlihatkan bahwa

kompleksitas identitas di mana satu individu menyandang identitas yang saling tumpang tindih dan kadang bertentangan sehingga dapat menjadi sumber ketegangan politik yang persisten ketika dikelola tanpa pendekatan yang inklusif.

Ketiga, dan inilah distingsi yang paling krusial untuk kajian ini, politisasi identitas (*politicization of identity*) adalah sesuatu yang secara kategoris berbeda dari dua konsep sebelumnya. Herdiansah (2017) mendefinisikannya sebagai upaya untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau memanipulasi identitas (baik berdasarkan agama, etnis, maupun kesetiaan pada ideologi tertentu) dengan tujuan menciptakan opini demi keuntungan politik seseorang atau kelompok tertentu. Yunus et al. (2023) mempertegas bahwa politisasi identitas secara terminologis berbeda dari politik identitas maupun identitas politik, dan perbedaan itu terletak pada orientasinya: bukan perjuangan atas nama kelompok, melainkan instrumentalisasi kelompok demi agenda elite. Robison et al. (2021) menambahkan dimensi komparatif dengan menunjukkan bahwa kampanye berbasis kelas di konteks demokrasi Barat juga bekerja melalui mekanisme serupa, yakni menarik dan sekaligus memolarisasi pemilih, suatu pola yang mengindikasikan bahwa politisasi identitas bukan fenomena yang eksklusif bagi demokrasi berkembang. Sugianto et al. (2023) mengonfirmasi bahwa dalam konteks Pemilu 2024 Indonesia, politik identitas tetap menjadi instrumen polarisasi yang digunakan secara strategis, meskipun dengan intensitas yang bergeser dibandingkan siklus 2019.

Tabel berikut merangkum perbedaan konseptual ketiga istilah tersebut:

Tabel 1. Perbedaan Konseptual Identitas Politik, Politik Identitas, dan Politisasi Identitas.

Dimensi	Identitas Politik	Politik Identitas	Politisasi Identitas
Subjek	Individu/kelompok	Kelompok marginal	Elite politik/aktor kekuasaan
Orientasi	Pemosisian diri dalam komunitas politik	Perjuangan keadilan dan pengakuan	Eksplorasi identitas demi kepentingan kekuasaan
Sifat	Natural/inheren	Emansipatoris	Instrumental/manipulatif
Risiko	Minimal	Fragmentasi jika ekstrem	Polarisasi dan konflik sosial

Memahami polarisasi semata sebagai divergensi posisi kebijakan adalah pembacaan yang tidak memadai untuk menjelaskan dinamika yang terjadi di media sosial. Iyengar et al. (2019) memperkenalkan konsep polarisasi afektif (*affective polarization*), yakni kecenderungan individu untuk memandang kelompok yang berlawanan secara negatif dan memperlakukan anggota kelompok sendiri secara positif, terlepas dari perbedaan substantif kebijakan. Polarisasi afektif berakar pada dinamika identitas sosial: ketika afiliasi partisan

menjadi identitas inti seseorang, permusuhan terhadap kelompok lawan tumbuh bukan karena perbedaan substantif, melainkan karena logika *in-group* dan *out-group* semata (Iyengar et al., 2012).

Polarisasi afektif yang menjadi sangat relevan untuk konteks media sosial dan politisasi identitas adalah dikarenakan sifatnya yang emosional dan berbasis penanda simbolik. Saat politisasi identitas mengaktivasi sentimen agama atau etnis, ia tidak sedang memproses argumen kebijakan, ia sedang menyalakan kemarahan dan ketakutan terhadap *out-group*. Mansyur (2023) mencatat bahwa dalam konteks Indonesia periode 2014-2019, polarisasi afektif ini termanifestasi dalam dikotomi tajam yang menembus batas-batas elektoral dan merasuk ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kholilurrohman (2024) memperlihatkan bahwa menjelang Pemilu 2024, praktik politisasi identitas tetap meninggalkan bekas dalam bentuk penurunan kualitas deliberasi demokratis, meskipun tidak sepanas siklus sebelumnya. Rahmadhani et al. (2024) menambahkan bahwa dampak polarisasi dalam pemilu bukan hanya bersifat elektoral, tetapi juga menyentuh dimensi sosial yang lebih luas seperti fragmentasi komunitas dan penguatan stereotip antarkelompok.

Eli Pariser (2011) dalam *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You* pertama kali merumuskan konsep filter bubble sebagai kondisi di mana algoritma platform digital secara otomatis menyaring konten yang ditampilkan kepada pengguna berdasarkan riwayat perilaku dan preferensi mereka. Implikasinya: pengguna secara progresif hanya terpapar pada informasi yang selaras dengan pandangan mereka sendiri, sementara perspektif yang berbeda tersaring keluar dari linimasa. Sistem rekomendasi ini tidak hanya membatasi keragaman informasi, tetapi juga memvalidasi dan memperkuat keyakinan yang sudah ada.

Echo chamber, meskipun kerap dipertukarkan dengan filter bubble, merujuk pada dinamika yang sedikit berbeda: kondisi di mana pengguna secara aktif mengumpulkan diri dengan individu-individu yang berpandangan serupa dan mengabaikan atau memusuhi perspektif yang berbeda. Di sini, homogenitas bukan semata produk algoritma, melainkan juga pilihan pengguna itu sendiri. Bail et al. (2018) dalam studi eksperimental yang terbit di *Proceedings of the National Academy of Sciences* menemukan temuan yang paradoksal: peserta yang sengaja dipaparkan pada pandangan politik berlawanan melalui akun bot di Twitter justru menjadi lebih terpolarisasi, bukan lebih moderat. Temuan ini menantang asumsi sederhana bahwa paparan terhadap keberagaman pandangan akan mengurangi polarisasi, dan mengisyaratkan bahwa mekanisme konfirmasi bias dan reaktansi psikologis bekerja jauh lebih kuat dari yang diduga.

Keduanya (filter bubble maupun echo chamber) tidak sekadar membatasi paparan informasi. Lebih dari itu, mereka berfungsi sebagai mesin amplifikasi bagi politisasi identitas. Ketika konten berbasis identitas (agama, etnis, ideologi) dikenali oleh algoritma sebagai konten yang memicu engagement tinggi (seperti kemarahan, ketakutan, atau loyalitas kelompok) maka algoritma akan memprioritaskan distribusinya. Dalam konteks ini, platform media sosial secara struktural menguntungkan konten yang mempertajam batas-batas identitas dan memperkuat narasi kita versus mereka (Mazliana et al., 2026). Sörbom dan Jezierska (2023) memperlihatkan bahwa bahkan ruang-ruang yang secara desain dimaksudkan sebagai arena dialog lintas ideologi seperti think tank pun tidak kebal terhadap tekanan polarisasi yang diperkuat oleh dinamika identitas kelompok.

Indonesia menyediakan konteks yang sangat relevan untuk memahami persimpangan antara politisasi identitas dan ekosistem digital. Mietzner dan Muhtadi (2018) menunjukkan bagaimana Gerakan 212 pada 2016 menjadi titik infleksi di mana mobilisasi berbasis identitas agama bertransformasi menjadi kekuatan politik elektoral yang terorganisasi. Yang menjadi catatan penting adalah dimensi digital dari mobilisasi ini: media sosial berperan sentral dalam menyebarkan narasi, mengorganisasi massa, dan mengintensifikasi sentimen antar kelompok.

Herdiansah (2017) menganalisis bagaimana pasca-2014, melemahnya institusionalisasi partai politik mendorong para politisi untuk berkolaborasi dengan aktor masyarakat sipil guna mereproduksi isu-isu identitas demi kemenangan elektoral. Ini adalah manifestasi klasik politisasi identitas: bukan kelompok marginal yang memperjuangkan haknya, melainkan elite kekuasaan yang mengeksploitasi solidaritas kelompok sebagai instrumen electoral gain. Putra dan Riyanto (2023) dalam konteks Kalimantan Barat menunjukkan bahwa faktor ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi menjadi kondisi yang menyuburkan politisasi identitas, karena kelompok yang merasa rentan lebih mudah dimobilisasi melalui narasi identitas. Lestari, D. (2019) secara khusus mendokumentasikan bagaimana dinamika politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menciptakan preseden yang kemudian berpengaruh pada pola kontestasi di tingkat nasional.

Mubarok (2023) menambahkan dimensi historis dengan menunjukkan bahwa fenomena politik identitas dalam arti yang emansipatoris sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, ia telah hadir sejak perdebatan konstituante dan termanifestasi dalam dinamika antara kelompok-kelompok agama dan ideologi sepanjang sejarah republik. Mashad (2021) memperkuat perspektif historis ini dengan menunjukkan bahwa perseteruan antara kelompok santri dan abangan merupakan akar kultural dari polarisasi identitas yang terus bergaung hingga era

digital. Yang membedakan era digital adalah skala, kecepatan, dan intensitas di mana identitas dapat dimobilisasi dan dipolarisasi.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kajian literatur konseptual (conceptual literature review) dengan orientasi sintesis teoretis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama tulisan ini bukan menghasilkan temuan empiris baru, melainkan memetakan, mengklarifikasi, dan mensintesis kerangka konseptual yang tersebar dalam berbagai literatur untuk membangun argumen analitis yang koheren tentang hubungan antara politisasi identitas, mekanisme digital, dan polarisasi.

Sumber data primer kajian ini adalah artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan prosiding konferensi yang relevan, dipilih secara purposif berdasarkan kriteria berikut: (1) relevansi tematik dengan topik identitas politik, polarisasi, dan media sosial; (2) kualitas sumber, dengan mengutamakan jurnal terindeks bereputasi dan publikasi dari lembaga riset kredibel; serta (3) periode publikasi, di mana mayoritas sumber berasal dari 2011 hingga 2026, dengan pengecualian untuk karya fundamental yang menjadi acuan klasik dalam bidang ini.

Proses sintesis dilakukan melalui tiga tahap: pertama, identifikasi dan pemetaan konsep-konsep kunci; kedua, analisis komparatif atas definisi dan kerangka yang diajukan berbagai penulis; ketiga, penyusunan argumen konseptual yang menghubungkan distinsi terminologis dengan mekanisme digital dan implikasinya terhadap polarisasi serta kewarganegaraan digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa Distinsi Konseptual Ini Penting

Kerancuan antara tiga istilah: identitas politik, politik identitas, dan politisasi identitas bukan sekadar masalah akademik. Ia memiliki konsekuensi praktis yang nyata. Ketika politisasi identitas disamakan dengan politik identitas, tuntutan pengakuan kelompok marginal yang sah secara demokratis ikut terstigmatisasi bersama strategi manipulatif elite. Sebaliknya, ketika politisasi identitas dikecilkan sebagai sekadar ekspresi identitas politik yang wajar, upaya-upaya elitis untuk mengeksploitasi kelompok sosial kehilangan sanksi moral yang seharusnya diterima.

Distinsi ini menjadi semakin kritis dalam era digital karena algoritma media sosial tidak membedakan antara ekspresi identitas yang emansipatoris dan yang manipulatif, keduanya diperlakukan sama sebagai konten yang memicu keterlibatan tinggi. Akibatnya, narasi

politisasi identitas mendapatkan amplifikasi yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan narasi yang berangkat dari perjuangan kelompok yang sungguh-sungguh terpinggirkan. Robison et al. (2021) menunjukkan bahwa efek tarik-polarisasi ini bersifat lintas konteks: di berbagai demokrasi, kampanye berbasis penanda kelompok cenderung memperkuat in-group sekaligus mempertajam permusuhan terhadap *out-group*.

Mekanisme Digital sebagai Amplifier Politisasi Identitas

Sintesis literatur dalam kajian ini menunjukkan bahwa hubungan antara media sosial dan politisasi identitas bersifat struktural, bukan insidental. Sistem rekomendasi algoritmik yang berorientasi pada maximizing engagement secara sistematis memprioritaskan konten yang memancing respons emosional, dan konten berbasis identitas yang dipolitisasi, dengan muatan kemarahan, ketakutan, dan loyalitas kelompok, memiliki nilai engagement yang tinggi (Pariser, 2011; Bail et al., 2018).

Dalam ekosistem ini, filter bubble bekerja sebagai mekanisme seleksi pasif: pengguna secara bertahap hanya dihadapkan pada konten yang mengkonfirmasi pandangan mereka, tanpa disadari. Echo chamber bekerja sebagai mekanisme penguatan aktif: komunitas daring yang terbentuk memvalidasi dan mengintensifikasi keyakinan bersama, sementara pandangan yang berbeda diperlakukan dengan permusuhan. Kombinasi keduanya menciptakan kondisi di mana identitas yang dipolitisasi tidak hanya tersebar, tetapi juga terkristalisasi menjadi kepercayaan yang sulit digoyahkan.

Studi Bail et al. (2018) memberikan peringatan penting: bahkan intervensi yang dirancang untuk mematahkan echo chamber dapat berbalik memperkuat polarisasi. Ini mengimplikasikan bahwa solusi terhadap politisasi identitas di media sosial tidak dapat diserahkan semata kepada paparan kontra-narasi, melainkan membutuhkan intervensi yang lebih struktural, mulai dari regulasi algoritma hingga penguatan literasi digital.

Polarisasi Afektif sebagai Produk Politisasi Identitas Digital

Salah satu temuan terpenting dari sintesis literatur ini adalah bahwa polarisasi yang diproduksi oleh politisasi identitas di media sosial lebih bersifat afektif daripada ideologis. Iyengar et al. (2019) menunjukkan bahwa polarisasi afektif telah meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Yang membedakan polarisasi afektif dari polarisasi ideologis adalah sifatnya yang resisten terhadap fakta dan argumen: sekali permusuhan terhadap *out-group* terbentuk atas dasar identitas, ia cenderung bertahan bahkan ketika perbedaan kebijakan substantif tidak signifikan (Iyengar et al., 2012).

Dalam konteks Indonesia, Mazliana et al. (2026) mencatat bahwa narasi kita versus mereka yang dihasilkan oleh politisasi identitas tidak hanya memperburuk kualitas dialog

publik, tetapi juga menembus ranah kehidupan sosial sehari-hari. Rahmadhani et al. (2024) menambahkan bahwa dampak polarisasi dalam pemilu bukan hanya bersifat elektoral, tetapi memperkuat stereotip dan mengurangi kohesi sosial antarkelompok. Kholilurrohman (2024) memperlihatkan bahwa meskipun intensitas politisasi identitas pada Pemilu 2024 relatif lebih rendah dibanding 2019, bekasnya dalam bentuk polarisasi afektif tetap terasa dalam kualitas deliberasi publik.

Implikasi bagi Kewarganegaraan Digital

Kewarganegaraan digital mengandaikan kapasitas warga negara untuk berpartisipasi dalam ruang publik digital secara terinformasi, kritis, dan bertanggung jawab. Mossberger et al. (2007) mendefinisikan warga negara digital sebagai mereka yang menggunakan internet secara reguler dan efektif untuk terlibat dalam kehidupan masyarakat dan politik, suatu definisi yang implisit mengandaikan kualitas partisipasi, bukan sekadar kuantitasnya.

Politisasi identitas yang diperkuat oleh mekanisme digital mengancam kapasitas ini pada dua level. Pada level epistemik, filter bubble dan echo chamber membatasi akses terhadap informasi yang beragam dan memperlemah kemampuan warga negara untuk membuat keputusan politik yang didasarkan pada pertimbangan komprehensif. Pada level deliberatif, polarisasi afektif yang dihasilkannya merusak prasyarat mendasar demokrasi deliberatif, yakni kesediaan untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan berdialog dengan pandangan yang berbeda. Sörbom dan Jezierska (2023) menunjukkan bahwa polarisasi bahkan dapat menyerap ke dalam ruang-ruang yang secara institusional dirancang untuk dialog, sehingga mempersempit kapasitas masyarakat sipil untuk menjadi penyeimbang kekuasaan.

Implikasinya bagi Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Dengan penetrasi media sosial yang sangat tinggi dan dengan siklus elektoral yang intensif, potensi bagi politisasi identitas untuk terus menjadi instrumen polarisasi tetap sangat besar. Penguatan literasi digital yang tidak hanya berfokus pada kecakapan teknis, tetapi juga pada kesadaran kritis terhadap cara kerja algoritma dan mekanisme manipulasi identitas, menjadi kebutuhan mendesak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini telah menunjukkan bahwa distinsi antara identitas politik, politik identitas, dan politisasi identitas bukan semata persoalan terminologis, melainkan menyangkut konsekuensi demokratis yang substantif. Identitas politik adalah kondisi natural setiap warga negara dalam kaitannya dengan sistem politik; politik identitas adalah ekspresi kolektif kelompok yang mencari pengakuan dan keadilan; sementara politisasi identitas adalah instrumen manipulatif yang mengeksploitasi penanda kelompok demi kepentingan elite. Percampuran ketiganya

mengaburkan pertanggungjawaban moral dan kebijakan yang seharusnya dikenakan secara berbeda.

Dalam ekosistem media sosial, politisasi identitas mendapatkan medium amplifikasi yang sangat efektif. Algoritma yang berorientasi pada engagement, mekanisme filter bubble yang menyaring perspektif, dan dinamika echo chamber yang mengintensifikasi keyakinan kelompok, ketiganya bekerja secara sinergis untuk memperkuat polarisasi afektif. Studi Bail et al. (2018) bahkan menunjukkan bahwa paparan pada pandangan yang berlawanan pun tidak serta-merta mengurangi polarisasi; dalam kondisi tertentu, ia justru memperdalam jarak antarkelompok.

Kajian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, diperlukan kerja edukasi publik yang serius untuk membedakan tiga konsep ini dalam diskursus demokratis, khususnya dalam konteks pendidikan kewarganegaraan digital. Kedua, regulasi terhadap sistem algoritma platform digital perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas partisipasi demokratis, bukan hanya terhadap privasi data. Ketiga, penelitian ke depan perlu mengeksplorasi secara empiris bagaimana mekanisme filter bubble dan echo chamber bekerja secara spesifik dalam konteks media sosial Indonesia, termasuk perbedaannya antarplatform dan antargenerasi.

Keterbatasan kajian ini terletak pada sifatnya yang konseptual: argumen yang dibangun bersandar pada sintesis literatur dan bukan pada pengujian empiris langsung atas kondisi di Indonesia. Kajian lanjutan yang menggunakan data empiris (baik melalui survei, eksperimen, maupun analisis konten digital) akan sangat diperlukan untuk memvalidasi dan memperkaya kerangka yang diusulkan di sini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas dukungan akademik dalam proses penyusunan kajian ini. Tulisan ini merupakan hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan riset kewarganegaraan digital.

DAFTAR REFERENSI

Bail, C. A., Argyle, L. P., Brown, T. W., Bumpus, J. P., Chen, H., Hunzaker, M. B. F., Lee, J., Mann, M., Merhout, F., & Volfovsky, A. (2018). Exposure to opposing views on social media can increase political polarization. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(37), 9216–9221. <https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115>

- Bozonelos, D., Wendt, J., Lee, C., Scarffe, J., Omae, M., Franco, J., Martin, B., & Veldhuis, S. (2022). *Introduction to comparative government and politics* (1st ed.). ASCCC Open Educational Resources Initiative.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya politik identitas di ranah lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 109–126. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Heaphy, M. (2021). Complex identity politics in Israel/Palestine. *The Organization for World Peace*. <https://theowp.org/reports/complex-identity-politics-in-israel-palestine/>
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi identitas dalam kompetisi pemilu di Indonesia pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 169–183.
- Heyes, C. (2020). Identity politics. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Fall 2020 ed.). Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/identity-politics/>
- Iyengar, S., Lelkes, Y., Levendusky, M., Malhotra, N., & Westwood, S. J. (2019). The origins and consequences of affective polarization in the United States. *Annual Review of Political Science*, 22, 129–146. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051117-073034>
- Iyengar, S., Sood, G., & Lelkes, Y. (2012). Affect, not ideology: A social identity perspective on polarization. *Public Opinion Quarterly*, 76(3), 405–431. <https://doi.org/10.1093/poq/nfs038>
- Judijanto, L., Hendrawan, A., Lase, F. P., Tambunan, R., & Hulu, Y. (2024). Pengaruh politik identitas dan penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik digital. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 24–35.
- Kholilurrohman, K. (2024). Praktik politik identitas menuju pemilu 2024 dan pengaruhnya terhadap demokrasi. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 4(1), 60–80.
- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika politik identitas di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(4), 12–16.
- Lestari, Y. S. (2018). Politik identitas di Indonesia: Antara nasionalisme dan agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19–29.
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi politik di Indonesia 2014–2019: Sebuah kajian pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1–22.
- Mashad, D. (2021). *Politik kaum santri dan abangan: Refleksi historis perseteruan NU-PKI*. Perpustakaan Al-Kautsar.
- Mazliana, A., Nazarlin, N., Putri, S. A., Fijriah, R., & Oktal, A. (2026). Politik identitas dan polarisasi sosial: Dinamika dalam demokrasi dengan tinjauan systematic literature review. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 1156–1169. <https://doi.org/10.63822/42tnm339>
- Mietzner, M. (2019). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 27(8), 1021–1036. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1696478>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>

- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2007). *Digital citizenship: The internet, society, and participation*. MIT Press.
- Mubarak, S. (2023). Akar politik identitas di Indonesia. *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 6, 1–19.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Books.
- Putra, G. B., & Riyanto, F. X. A. (2023). Menelusik politik identitas di Kalimantan Barat berdasarkan perspektif filsafat politik Armada Riyanto. *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i1.64948>
- Rahmadhani, A., Nurhasanah, S., Fatimah, S., Aditya, M. R., & Sunengsih, S. (2024). Politik identitas dan polarisasi dalam pemilu. *IJEDR*, 3(1), 364–370.
- Robison, J., Stubager, R., Thau, M., & Tilley, J. (2021). Does class-based campaigning work? How working-class appeals attract and polarize voters. *Comparative Political Studies*, 54(5), 723–752. <https://doi.org/10.1177/0010414020957684>
- Sörbom, A., & Jezierska, K. (2023). Social capital and polarization: The case of Polish think tanks. *Journal of Civil Society*, 19(4), 347–365.
- Sugianto, S., Visman, V., & Darwin, D. (2023). Politik identitas terhadap polarisasi pemilu 2024. *JISIP*, 12(2), 865–872.
- Syamsidar, N., Putra, M., & Hidayati, S. (2023). Hoaks dan dampaknya terhadap partisipasi demokrasi masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 9(1), 40–52.
- Taufiqurokhman, & Almuqsith, M. (2025). Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Otonomi Daerah*, 14(1), 10–24.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Utami, D., Nugraha, F., & Lestari, Y. (2024). Keterbukaan informasi publik sebagai instrumen good governance. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 80–93.
- Wahyuni, S., & Desiandri, R. (2024). Kebebasan berpendapat dalam perspektif demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 101–115.
- Yolanda, A., Prasetyo, D., & Ramadhan, F. (2025). Prinsip-prinsip good governance dalam reformasi birokrasi Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(1), 50–66.